

# MODERNISASI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA

(Tela'ah Pemikiran A. Mukti Ali)

*Halimah Dja'far<sup>2</sup>*

**Abstract:** *This article uncovers A. Mukti Ali 's thoughts in his efforts to modernize the religious thoughts in Indonesia. All A. Mukti Ali 's works are analyze employing analytical critical and historical approaches. A. Mukti Ali is in the opinion of the importance of the religion in national development. So dialog and harmonization among pertaining parties in this countries are of great importance. He also contributes in the establishment of MUI (The Indonesian Council of Ulama) as the representative body for the affairs and interests of Muslim people in Indonesia. He is also credited to the efforts to position Muslims as the capitals no the barriers, of national development.*

**Kata Kunci:** *Modernisasi, Islam Indonesia*

Konsep pembangunan dan modernisasi pada dasarnya adalah pemindahan pengalaman Barat dan Amerika Utara ke dalam masyarakat Indonesia. Hampir semua negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia, memasukkan konsep modernisasi dalam gerak pembangunannya. Gagasan modernisasi ikut “membonceng” dalam gerak pembangunan diawali pemerintah Orde Baru yang kentara dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Rencana Pelita dimulai tahun 1969, merupakan langkah yang dimaksudkan untuk merealisasikan konsep modernisasi. Karakteristik utama dari suatu rancangan

---

<sup>2</sup> Halimah Dja'far adalah Dosen Fakultas Adab IAIN STS Jambi.

pembangunan dan modernisasi adalah *idea of progress* (gagasan kemajuan). Di dalam *idea of progress* akan dihadapkanlah antara “Keterbelakangan” dan “Kemajuan”, “tradisional” dan “modern” (Ali dan Bahtiar, 1966:107).

Berkenaan dengan ide pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto, bagaimanakah Umat Islam Indonesia melihat dan memahami modernisasi dari kaca mata ajaran Islam? Apakah modernisasi yang jelas-jelas bersifat pragmatis itu tidak menimbulkan implikasi negatif pada Umat Islam Indonesia? Bukanlah setiap pembicaraan tentang modernisasi selalu terkait di dalamnya isu-isu mengenai westernisasi (pembabatan) dan sekularisasi (pemisahan antara urusan publik dan agama). Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan polemik dan diskusi di kalangan umat Islam di Indonesia.

Sebenarnya menjelang pergantian dasawarsa tahun 1960-an, modernisasi telah menjadi tema penting dalam konteks perubahan sosial, politik, ekonomi dan keagamaan di Indonesia. Hanya saja pembicaraannya baru sebatas di kalangan intelektual muslim Indonesia. Mereka menyadari bahwa modernisasi merupakan persoalan yang tidak bisa dihindarkan oleh suatu negara yang sedang membangun, seperti Indonesia. Modernisasi seakan satu paket dengan program dan proses Pembangunan. Karena itu, umat Islam harus mengambil sikap apakah ambil bagian atau tidak (Rahardjo, 1987: 16).

Untuk inilah, sejak akhir tahun 1960-an, kalangan muda muslim dari organisasi kampus dan organisasi sosial keagamaan aktif membahas masalah modernisasi. Ini kentara dari tulisan-tulisan yang dimuat di koran-koran mahasiswa, dan berbagai majalah kampus, serta berbagai seminar yang diselenggarakan (Rahardjo, 1987: 16). Termasuk A. Mukti Ali sendiri dengan intensif membahas hubungan agama dan modernisasi di Indonesia. A. Mukti Ali terlibat langsung dalam diskusi dengan kelompok bernama “Lingkaran diskusi Limited Group” di rumahnya (Wahib, 1995: viii). Mereka mendiskusikan dan mencari solusi terhadap hubungan antara agama dan modernisasi.

Pada dasarnya, umat Islam Indonesia tidak menolak *idea of progress* yang terkandung dalam konsep modernisasi. Hanya

saja modernisasi harus diterapkan secara hati-hati. Pada sisi lain pemerintah jelas berkepentingan dan menginginkan keterlibatan umat beragama, khususnya Umat Islam di Indonesia dalam proses pembangunan dan modernisasi. Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam jangan sampai menjadi halangan dalam proses pembangunan dan modernisasi.

Tidak sedikit yang berpendapat bahwa umat Islam Indonesia dan ajarannya dikhawatirkan menghambat proses pembangunan dan modernisasi. Umpamanya, keraguan akan kesesuaian ajaran dan konsep modernisasi disuarakan dalam Harian *Barita Yudha* (Hasan, 1907:11-52). Partai-partai politik Islam dan umat Islam juga dituduh oleh lawan ideologisnya sebagai “anti pembangunan dan “anti Pancasila” (Boland, 1971: 90-99).

Pemerintah Soeharto sangat menyadari potensi Umat Islam dalam menujung proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Meski Indonesia bukan negara agama (teokrasi), tetapi pemerintah memiliki sebuah Departemen Agama. Hal pertama yang dilakukan Soeharto adalah mencari Figur yang tepat untuk memimpin dan membenahi Departemen Agama, yang merupakan mediator bagi pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan dan modernisasi kepada umat beragama. Di awal Pemerintahannya Soeharto menyadari Departemen Agama masih didominasi oleh kalangan tradisional, selain itu kebijakan Menteri Agama masih dipandang oleh pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari Orde Lama yang terlalu bersifat politis (Jamali dan Jamhari, 2002: 15).

Keputusan Soeharto mengangkat A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama di awal era pembangunan salah satunya didasari pertimbangan untuk mengakomodasi umat beragama agar berperan dalam menjalankan program pembangunan dan modernisasi di Indonesia (Anonim, 1987: 76). Pemerintahan Soeharto ingin Depag identik dengan aspirasi keagamaan Islam dan responsif terhadap isu-isu modernisasi. Dalam kaitannya dengan ide modernisasi keagamaan di Indonesia, A. Mukti Ali melihat ada tiga hal yang fundamental yang harus dihadapi; *pertama*, kerukunan umat beragama, maka menurutnya perlunya dikembangkan tradisi dialog antar agama; *kedua*, menjadikan agama sebagai landasan pembangunan nasional.

Ia ingin membantah, baik dengan argumen akademis, maupun empirik, bahwa agama sesungguhnya adalah pendorong utama dalam proses pembangunan. Maka ia pun mengusahakan agar pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga produktif; *ketiga*, masalah kepemimpinan umat, ia pun sebagaimana sering dikatakan “membedani” kelahiran Majelis Ulama Indonesia (Anonim, 1987: 76).

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu menelaah kembali ide-ide para tokoh pemikir Indonesia dalam merespon ketegangan yang bersifat keagamaan serta gagasannya dalam membangun bangsa ini. Untuk diaktualisasi dan disosialisasikan dalam konteks pluralisme dewasa ini, khususnya pemikiran A. Mukti Ali yang penulis ungkapkan dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut: kenapa A. Mukti Ali melakukan modernisasi Keagamaan Islam di Indonesia?; apa langkah-langkah A. Mukti Ali dalam modernisasi keagamaan Islam di Indonesia?; serta bagaimana pula relevansi dan aktualisasi pemikiran A. Mukti Ali dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia sekarang?

## **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat langkah-langkah A. Mukti Ali dalam mereaktualisasi nilai-nilai keagamaan Islam di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama yang sesuai dengan konteks kehidupan beragama di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memahami dan mengkritisi pemikiran A. Mukti Ali. Fokusnya adalah pemikirannya tentang modernisasi pemahaman agama Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati dan menelusuri proses terbentuknya gagasan dan pemikiran seorang tokoh berdasarkan konteks sosio-kultur kehidupannya.

Sumber primer yang digunakan adalah karya-karya A. Mukti Ali; di antaranya *Agama dalam Pegumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1998), *Pelbagai Persoalan Islam Di Indonesia Dewasa ini*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia*, (Bandung; Mizan, 1992). Di dalam buku tersebut terdapat banyak pemikiran A. Mukti Ali tentang agama dan modernisasi, tulisan-tulisan sarjana lain tentang A. Mukti Ali akan dijadikan sebagai data sekunder. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dan selanjutnya dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Sosial Intelektual**

A. Mukti Ali lahir pada tanggal 23 Agustus 1923 di kota Cepu Jawa Tengah. Ketika lahir ia diberi nama Boedjono. A. Mukti Ali adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Idris atau Haji Abu Ali, demikian digelar setelah menunaikan ibadah haji, seorang pedagang tembakau yang cukup sukses.

Pada usia 7 tahun, Boedjono dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah milik Belanda, belakangan pada 1941 menjadi HIS. Di samping itu, ia juga disekolahkan pada madrasah diniyah di sore harinya. Tahun 1938, ia menamatkan sekolahnya dan mendapat sertifikat kepegawaian Belanda; *Klein Ambtenar Examen*. Pada pertengahan 1940, Boedjono dimasukkan ayahnya ke pondok pesantren Termas, Kediri. Dari pesantren inilah, ia mengalami perkembangan pemikiran dan sikap. Sistem belajar di Pesantren Termas adalah perpaduan sistem sekolah Belanda dan pesantren di Jawa pada umumnya. Di pesantren telah digunakan pembagian kelas dalam kegiatan ngaji kitab, bahasa Arab, fiqh, hadits, akhlak, dan tasawuf. Selain itu, ia juga belajar di Pesantren Tebuireng, pesantren Lasem, dalam bentuk "mondok" beberapa bulan terutama di bulan Ramadhan. Melalui mondok di beberapa pesantren, ia mengkaji khazanah intelektual Islam klasik, untuk memperkuat jati diri keislamannya (Abdurrahman, 1993: 7).

Selain tekun belajar agama di pesantren Termas, A. Mukti Ali juga dikenal cakap dalam kegiatan sosial dan politik. Ia turut mengamati isu-isu politik seperti; menyebarnya nasionalisme di awal tahun 1945, masuknya Jepang, berdirinya Masyumi, terbentuknya

tentara Hizbullah, dan lainnya. Di Pesantren Termas, A. Mukti Ali membentuk kelompok kecil yang terdiri dari teman-teman dekatnya, di mana ia bisa menyampaikan ide-ide politiknya.

Semasa masih di Pesantren Termas A. Mukti Ali mendapat pengalaman yang tak dapat ia lupakan. Ketika itu, KH. Abdul Hamid, pimpinan pondok memanggilnya dan mengatakan ingin memperlakukan A. Mukti Ali seperti anaknya sendiri, dan ia meminta agar nama jawanya Boedjono menjadi A. Mukti Ali, karena nama yang terakhir ini lebih Islami.

Pada masa di pesantren ini pula A. Mukti Ali terlibat dalam "Pergerakan perjuangan" menentang penjajah. Dalam hal ini mereka termotivasi dengan semangat keagamaan dan komitmen terhadap pemimpin nasional yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, perkumpulan ini berubah menjadi sayap militer, setelah Masyumi mengambil alih pimpinan dan mengubahnya menjadi sayap militer Hizbullah untuk distrik Termas. Sebelum ia lebih jauh terjun ke medan tempur, ia meminta restu orang tuanya, namun orang tuanya tidak mengizinkan A. Mukti Ali untuk menjadi tentara.

Tahun 1946, A. Mukti Ali menamatkan pendidikannya di pesantren Termas. Pada tahun itu juga ia melibatkan diri dalam dunia politik selama masa-masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, kemudian ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kabupaten Blora, mewakili Masyumi.

Karir di bidang politik tidak memudahkan minat Mukti Ali dalam dunia akademik. Pada tahun 1947, A. Mukti Ali melanjutkan studinya di sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta, kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Di STI A. Mukti Ali bertemu dengan KH. Mas Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah dan dosen di sana. Pemikiran Kiai Mas Mansur mempengaruhi pemikiran A. Mukti Ali.

Sebenarnya, secara resmi A. Mukti Ali tidak pernah terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah, tetapi juga bukan anggota NU. Namun, ia sering dipandang sebagai tokoh Muhammadiyah (Munhanif, 1996: 127).

A. Mukti Ali melanjutkan studinya ke Mekkah tahun 1950. Tidak sampai setahun, A. Mukti Ali berada di Mekkah, ia melanjutkan

studinya ke Karachi, Pakistan pada tahun 1951. A. Mukti Ali diterima di Fakultas Sastra Arab, Universitas Karachi, dalam Program Sejarah Islam. Setelah lima tahun A. Mukti Ali menamatkan studinya sampai program Ph.D di Universitas Karachi. Namun, atas anjuran Anwar Harjono, mantan Sekjen Masyumi, ia tidak pulang ke Indonesia dan meneruskan studinya di Institute Of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal Kanada. A. Mukti Ali tiba di Montreal pada Agustus 1955, dan mengambil spesialisasi pada ilmu perbandingan agama. Di Universitas Mc Gill inilah, pemahaman A. Mukti Ali tentang Islam berubah secara fundamental. Ini akibat perkenalannya dengan metode studi agama-agama, dan pergaulannya dengan ahli-ahli Islam yang mengajar di Universitas itu, khususnya Wilfred Cantwell Smith, seorang sarjana Islam kebangsaan Amerika dengan pemahaman yang simpatik atas Islam (Munhanif, 1996: 32-34).

Di Mc Gill, A. Mukti Ali mendapatkan pengalaman bahwa belajar Islam atau agama apapun, mestinya diarahkan pada usaha bagaimana sebuah tradisi keagamaan diarahkan pada suatu usaha bisa menjawab masalah-masalah masyarakat modern. Atas dasar ini, ia menegaskan perlunya memperkenalkan pendekatan yang empiris atas Islam sebagai jalan untuk menafsirkan ulang khazanah pemikiran Islam dalam konteks modernitas. Pendekatan Islam seperti ini, yang selama ini diabaikan oleh metode pembelajaran tradisional seperti di pesantren, akan membawa Islam dan umatnya bisa menerima, bahkan bersikap simpatik terhadap wacana kemodernan, misalnya kebebasan intelektual, konsep kenegaraan, hak-hak wanita, dan dialog antar umat beragama.

A. Mukti Ali sangat tertarik dengan cara mengajar Prof. Smith yang begitu sistematis dan komprehensif seperti yang ditulis dalam memoarnya, “sebelum pergi ke Kanada, saya tidak tahu sama sekali tentang ilmu perbandingan agama. Spesialisasi saya di Karachi adalah sejarah Islam. Karena walaupun di Mc Gill saya belajar dengan banyak Profesor, seperti Nijazi Berkes dari Turki, William Bugli dari Inggris, Bahi dari Mesir, saya lebih banyak tertarik kuliah dengan Prof. Smith. Saya tidak tahu kenapa. Ada alasannya, tentu saja, pertama adalah cara mengajarnya sangat bagus dan menguasai materi; kedua saya menyukai metode analisis yang dipakainya”.

Kemudian ia melanjutkan, “yang terpenting dari semua itu adalah Prof. Smith memperkenalkan kepada saya suatu pendekatan baru dalam studi Islam. Ia menggunakan analisa perbandingan dalam kajian agama-agama, yaitu mencoba melihat suatu fenomena keagamaan dari seluruh aspeknya. Kalau boleh saya menyebut, pendekatan ini adalah “pendekatan holistik” terhadap agama. Suatu pendekatan yang banyak mempengaruhi jalan pikiran saya, atau bahkan dalam konteks yang luas, mengubah sikap saya dalam memahami manusia” (Munhanif, 1998: 282).

Dengan demikian, perhatian A. Mukti Ali terhadap problem masalah kerukunan umat beragama sebenarnya bisa dimulai sebagai sebuah transformasi religius intelektual, di mana ia menemukan jawaban atas pergulatan-pergulatan pribadi selama ini, yakni interaksi antar umat beragama di Indonesia. Dikemudian hari dikenal sebagai sarjana Muslim yang tanpa lelah memperkenalkan kepada masyarakat luas, terutama mahasiswa, perlunya ilmu perbandingan agama. A. Mukti Ali menamatkan studinya di Mc Gill University, pada tahun 1957. A. Mukti Ali menulis tesis berjudul: *A Bibliographical Study of Muhammadiyah Movement In Indonesia*.

### **Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI**

A. Mukti Ali dilantik sebagai Menteri Agama RI pada 11 September 1971, beberapa bulan setelah pemilu. Ia menggantikan KH. Muhammad Dachlan, Menteri Agama dari NU pada kabinet Pembangunan I tahun 1968, yang belum habis masa jabatannya. Beberapa analisa menyatakan, penunjukan A. Mukti Ali untuk memimpin Departemen Agama itu dimaksudkan sebagai langkah Orde Baru untuk mengadakan restrukturisasi dan reorientasi kebijakan di Departemen Agama tersebut dengan keahliannya dalam bidang ilmu-ilmu agama, A. Mukti Ali dianggap sebagai orang yang berkompeten menjalankan maksud tersebut. Pada 28 Maret 1973, setahun setelah pemilu pertama Orde Baru, ia kembali dilantik sebagai menteri agama bersama menteri-menteri lain dalam Kabinet Pembangunan II (Munhanif, 1996: 120).

Sebenarnya karir politik A. Mukti Ali di Departemen Agama RI tidak diawali dari kegiatan politik, tetapi dari dunia akademik. Sekembalinya dari Montreal, Canada, pada tahun 1957, A. Mukti Ali

mengajar di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), di Jakarta, dan perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), di Yogyakarta, yang keduanya kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Sejak awal mengajar, A. Mukti Ali mulai memperkenalkan Ilmu perbandingan agama. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia hingga 1950-an, mempelajari ilmu ini adalah suatu fenomena baru, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi sekalipun.

Ketekunan di dunia akademik membawa A. Mukti Ali pada posisi lain di lingkungan pendidikan tinggi. Sebelum menduduki jabatan menteri agama, ia adalah dosen tetap di Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, selain itu ia pernah menjabat pembantu rektor III di tahun 1964, kemudian dipercaya menjabat pembantu rektor I, pada tahun 1968. Sebulan menjabat menteri, pada Oktober 1971, A. Mukti Ali dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **Karya dan Perkembangan Pemikiran**

A. Mukti Ali adalah seorang yang kreatif dan produktif dalam menulis. Pada tahun 1950, bersama Joesdi Dhazali, ia menerbitkan majalah "Siyar Islam", ia juga sering menulis pada majalah Islam "Panji Masyarakat" yang diasuh oleh Hamka. A. Mukti Ali juga sempat menjadi salah satu seorang penerjemah al-Quran pada tahun 1961.

Ketika menjabat sebagai Menteri Agama, A. Mukti Ali tetap meluangkan waktu untuk menulis. Di antara tulisannya yang terbit pada masa menjabat menteri adalah *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (1972). Setelah tidak menjabat sebagai Menteri Agama, A. Mukti Ali dipercaya sebagai anggota Dewan Petimbangan Agung (DPA) tahun 1987-1982. Di sela-sela kesibukannya ini, ia masih sempat melahirkan banyak karya di antaranya *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1988), *Ijtihad Dalam Pandangan M. Abduh, Ahmad Dahlan dan Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), *Metode Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), *Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, (Jakarta: Jembatan, 1994).

Terkait dengan aktivitas menulis, jika dikelompokkan ada tiga tema pokok pikiran; *pertama*, tulisannya tentang metodologi dan pemikiran keislaman; *kedua*, tulisannya tentang sejarah dan hubungan antar agama. Sebelum menjabat menteri agama, tulisannya banyak membahas tentang sejarah, persoalan keagamaan dan kaitannya dengan pembangunan. Adapun ketika menjabat sebagai menteri agama antara lain *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama). Selama menjabat Menteri Agama, tulisan A. Mukti Ali mulai terarah pada metodologi memahami agama dan kaitannya dengan pembangunan. Inilah tema pokok pikirannya ketiga.

Di dalam bukunya yang berjudul *Pelbagai Persoalan Islam di Indonesia Dewasa Ini* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), A. Mukti Ali mengemukakan kondisi umat Islam saat ini secara makro dalam keadaan “kritis”, baik secara politis, ekonomis, sosial, maupun keagamaan. Jika tidak disikapi dengan sungguh-sungguh maka ada kemungkinan Islam akan kehilangan kekuatan di Indonesia. Menurut A. Mukti Ali, ada tiga cara yang merupakan syarat bagi perkembangan suatu kelompok masyarakat, yaitu; kepemimpinan (*leadership*), ide yang ideal, dan organisasi atau cara untuk mencapai suatu ide.

Pemikiran A. Mukti Ali yang berkaitan dengan keislaman dan kemodernan di Indonesia dapat dilihat dalam bukunya *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971), ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam versi Inggris pernah disampaikan pada *Congress of Cultural Freedom* di Karachi, Pakistan, Februari 1969. Dalam karya ini A. Mukti Ali berpendapat bahwa Islam di Indonesia mendapat pengaruh yang besar dari dunia Muslim Arab dan India.

Pemikiran A. Mukti Ali tentang dialog antar agama ditampilkan dalam berbagai kongres dialog agama yang ikutinnya. Pertama adalah *The Ninth Congress For The History Of Religion* di Tokyo pada 1958. Kongres ini diselenggarakan oleh *International Association For The History Of Religion* (IAHR) cabang Jepang.

Kedua adalah *Dialogue Between Men of Living Peace* di Beirut pada tahun 1970. Konferensi ini diselenggarakan oleh *Word of Churches*. Tujuannya adalah memupuk rasa tanggung jawab bersama

tentang permasalahan umat manusia dalam hubungannya dengan konflik antar agama sekaligus mencari jalan pemecahannya.

Kongres ketiga adalah *World Conference on Religion and Peace* di Tokyo pada 1970. Dalam kongres ini, makalah A. Mukti Ali berjudul *Dialogue Between Moslems and Christians in Indonesia and Its Problem*.

### **Modernisasi Keagamaan Islam di Indonesia**

Secara leksikal, modernisasi merupakan derivasi dari kata *modern* (Inggris), secara etimologi berarti *of the present or recent time* (sesuatu yang terkait dengan kekinian) atau yang baru dan *up-to-date* (mengikuti perkembangan zaman) (Hornby, 1987: 544). Secara sederhana, modernisasi berarti “usaha untuk menjadikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang atau menurut perkembangan zaman (*to make suitable for present day needs; to bring up-to-date*)” (Hornby, 1987: 544).

Dari kalangan ilmuwan sosial umpamanya, Soejadmoko mendefenisikan modernisasi sebagai “menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya dengan penggunaan secara rasional dari pada ilmu dan teknololgi atas sumber segala macam sumber kemampuannya. Sedangkan antropolog Koentjaraningrat mengartikan modernisasi itu sebagai “usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang” (Koentjaraningrat, 1974: 133).

Akan tetapi, pengertian yang diutarakan di atas tampaknya masih bersifat umum, artinya apa yang tergambar sejauh ini masih berkisar modernisasi sosial dan budaya, dan tidak khusus menyentuh dalam hubungan dengan agama. Sebab, bagaimanapun harus dibedakan antara modernisasi bidang keagamaan dan modernisasi sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, modernisasi merupakan cara pandang dalam kehidupan dan keduniaan. Sedangkan modernisasi bidang keagamaan bersifat doktrin, ideologis, dan akhirat. Meskipun terlihat adanya persamaan dalam hal bahwa keduanya berusaha untuk menyesuaikan antara wilayah yang semestinya (*das sein*) dan wilayah yang sepatutnya (*das sollen*). Sebab pertentangan antara keduanya seringkali menyebabkan masyarakat menjadi tidak

dinamis sehingga tidak dapat mengeksplorasi lebih lanjut nilai-nilai pembangunan.

Bagaimanapun modernisasi keagamaan tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan modernisasi kebudayaan, sebab modernisasi kebudayaan dapat saja menerima penggunaan bahan-bahan modern, cara pandang yang lebih dinamis bahkan perubahan hidup secara total sehingga masyarakat dapat lebih hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang lebih maju. Namun, agama dalam hal ini, tidak sepenuhnya dapat menerima hal-hal tersebut, lantaran penganut agama memiliki unsur-unsur sakralitas ritual yang yang tetap harus ditampilkan apa adanya. Cara shalat, bagaimanapun tidak dapat digantikan dengan bentuk atau cara yang lain yang dianggap lebih modern.

Hal ini tentunya wajar, karena modernisasi pada mulanya merupakan pengalaman Barat yang telah membuat perubahan besar-besaran, mulai abad ke-16 dan secara menyeluruh abad ke-18 di berbagai bidang; sosial, ekonomi, kultural, politis, sampai bidang ideologis. Inti dari modernisasi dalam kesadaran Barat adalah “kebudayaan ontologis” di abad pertengahan kepada masyarakat dalam “kebudayaan fungsional”.

Konsep modernisasi di Barat, menjadikan manusia sebagai sentral alam. Manusia dengan kemampuan rasionya hanya ingin menyelidiki dan memahami fenomena yang bersifat material. Hal inilah yang membawa masyarakat modern di Barat mengabaikan hal-hal yang bersifat spiritual, yang pada gilirannya meragukan peran dan kemampuan agama mengikuti perkembangan modern. Dengan demikian, di dunia Barat modernisasi tidak mengikutsertakan agama. Lalu bagaimana dengan posisi Islam terkait dengan proses modernisasi. Untuk memperjelas sedikit tentang pengertian modernisasi keagamaan, cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid memaparkan bahwa pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Dalam hal ini berarti proses perombakan pola pikir atau tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola pikir atau tata kerja baru yang rasional. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia

di bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan, tidak lain ialah hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum objektif yang menguasai alam, ideal dan material, sehingga alam ini berjalan menurut kepastian tertentu dan harmonis. Orang yang bertindak menurut ilmu pengetahuan (ilmiah), berarti ia bertindak menurut hukum alam yang berlaku. Sebab ia tidak melawan hukum alam, malahan menggunakan hukum alam itu sendiri sehingga memperoleh daya guna yang tinggi. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan sesuai dengan hukum alam yang berlaku (Madjid, 1987: 172).

Istilah modernisasi keagamaan sering pula dipakai secara tumpang tindih dengan modernisme keagamaan di dunia Barat. Modernisasi dalam pandangan Barat, sebagaimana dikemukakan Harun Nasution, mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena beberapa doktrin Kristen di Barat ada yang bertentangan dengan konsep modernisme, sehingga terjadi pertentangan dan pemisahan antara keduanya. Pemisahan ini dikenal dengan sekulerisme (Nasution, 1996: 181).

Menurut Ahmad Hasan, modernisme adalah aliran keagamaan yang "menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian Islam harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern (Hasan, 1976: 226-227). A. Mukti Ali, tampaknya, setuju dengan pengertian tersebut, tetapi ia menekankan defenisi modernisasi pada usaha "purifikasi agama" dan "kebebasan berpikir". Bagi A. Mukti Ali, modernisme adalah paham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada al-Quran dan sunnah serta mendorong kebebasan berpikir sepanjang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadist yang shahih (Ali, 1982: 215-216).

Bassam Tibbi menegaskan bahwa kaum modernis adalah kelompok orang-orang yang melakukan pengintegrasian ilmu dan teknologi modern ke dalam Islam, tetapi berusaha menghindari

berbagai konsekuensi negatif dari penerapannya (Mahendra, 1999: 13).

Dengan demikian, terlihat bahwa modernisasi keagamaan bertujuan untuk menyesuaikan antara watak manusia yang fleksibel tersebut dengan nilai-nilai agama Islam. Sementara jalan yang paling tepat ke arah ini adalah dengan menekankan kembali prinsip “kembali kepada al-Quran dan Sunnah” serta melakukan rasionalisasi terhadapnya atau dalam bahasa agama ialah dengan menggalakkan ijtihad, khususnya dalam wilayah muamalah. Wilayah yang terakhir inilah yang agaknya menjadi *concern* kaum modernis dalam usaha mereka mewujudkan cita-cita Islam. Modernisme sering dipertentangan dengan kalangan tradisionalisme atau fundamentalisme yang sering terpaku pada penafsiran literal, dan sikap apolegetik pada hasil penafsiran ulama terdahulu. Jadi dengan meminjam kesadaran Barat, modernisasi keagamaan juga berarti melakukan pembebasan dari masyarakat “fatalistik eksklusif” menuju masyarakat yang lebih “dinamis dan inklusif”.

Istilah lain yang sering dipakai untuk kata modernisasi adalah *tajdid*. Dalam bahasa Indonesia, kata ini sejajar dengan kata “pembaharuan”. Harun Nasution tampaknya menyamakan istilah modernisasi, *tajdid*, maupun pembaharuan (Harun, 1996: 12). Hal ini cukup wajar karena *tajdid* memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda bahkan nyaris serupa dengan pengertian modernisasi (keagamaan) di atas. Yakni pembaharuan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai reaksi terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat (Anonim, 1987: 42).

Gerakan pembaharuan dalam Islam terdapat pada periode modern. Modernisasi dan *tajdid*, kedua istilah ini seringkali dipakai untuk tujuan yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebab, *tajdid* maupun modernisasi keduanya sama-sama menentang taklid dan menyerukan kembali kepada al-Quran dan Hadist serta membuka pintu ijtihad. Hanya saja kalau gerakan *tajdid* atau gerakan Islam pra-modern dilatarbelakangi faktor internal, terutama berkenaan dengan soal akidah sehingga ia lebih mengarah pada gerakan purifikasi, maka gerakan modernisasi dimotivasi oleh faktor internal dan eksternal, baik oleh kelemahan internal, maupun oleh ancaman politis, religio-kultural dan kolonialisme (Daud, 1994: 43).

## **Munculnya Modernisasi Keagamaan Islam di Indonesia**

Modernisasi keagamaan di Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konteks gerakan modernisme di Timur Tengah. Tokoh utamanya adalah Sayyid Jamaluddin al-Afgani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) (Noer, 1980: 25). Selain itu dapat pula dikatakan bahwa munculnya usaha modernisasi di bidang keagamaan di Indonesia akibat konflik internal sebagai cikal bakal lahirnya modernisasi (*tajdid*), misalnya dalam konflik yang terus menerus antara kelompok “tradisional” dan kalangan “muda” yang ingin melakukan gerakan pembaharuan.

Konflik ini diperparah lagi dengan meningkatnya hubungan antara umat Islam Indonesia dengan para sarjana alumni Timur Tengah. Orang-orang Indonesia mulai menyadari perbedaan-perbedaan dalam menerapkan agama di antara dua tempat tersebut, dan menjadi yakin bahwa reformasi harus dijalankan demi membawa Islam di Indonesia lebih dekat kepada *mainstream* Islam (Haris, 1997: 36-37).

Gagasan Modernisasi Islam secara umum sebenarnya lebih banyak dipicu oleh kesadaran inferioritas umat Islam dan superioritas bangsa lain. Sebagai akibat dari imperialisme di berbagai wilayah Islam, umat Islam mulai mendapati diri mereka begitu tertinggal dari bangsa-bangsa Barat. Walaupun tampaknya mereka hanya melihat ketertinggalan itu pada segi-segi yang sifatnya materialisme, seperti teknologi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Atas dasar inilah tampil sekelompok intelektual yang berusaha melawan kolonialisme dan imperialisme, dengan pendekatan yang lebih akademis, berupa pencerahan dan pemikiran atau mungkin malah dengan kekuatan dalam bentuk aksi (revolusi). Kolonialisme dan imperialisme di dunia Islam sejak abad ke 17, telah menyadarkan umat Islam akan keterbelakangan budaya dan kejumudan intelektual mereka, sehingga mendorong munculnya gerakan modernisme sebagai akar dari gerakan modernisasi (sering disebut sebagai modernisme) Islam.

Dalam catatan Deliar Noer, gerakan modernisasi dalam Islam di Indonesia memiliki cikal bakal pertumbuhan di daerah Minangkabau. Dalam hal ini, Syeikh Ahmad Khatib (1855-1916) dianggap sebagai pioner yang menyebarkan pikiran-pikiran pembaharuan dari Makkah.

Meskipun diakui pula, bahwa Syekh Ahmad Khatib bukanlah orang yang pertama yang menyebarkan pembaharuan Islam di Minangkabau. Sebab, pada permulaan abad ke-19 golongan yang di sebut sebagai Kaum Paderi telah berusaha untuk melancarkan pembaharuan di daerah itu, tetapi mereka mendapatkan hambatan yang sangat keras dari Kaum Adat (Noer, 1980: 38).

Dampak dari pengaruh pendidikan Timur Tengah adalah munculnya semangat pembaharuan plus pemurnian akidah di dalam diri mereka. Inti gerakan ini hampir sama dengan gerakan Paderi, sehingga kerap kali di sebut sebagai metamorfosis Paderi baru yang lebih dikenal dengan “kaum muda”, sebuah istilah untuk menunjukan sekelompok orang yang seakan-akan memisahkan diri dari golongan adat, yang tidak menyukai perubahan-perubahan yang diperjuangkan oleh ulama Islam. Sebagai lawannya adalah “Kaum Tua” yakni sekelompok orang (ulama) pro *status quo*, pada kebiasaan yang dianut.

Gagasan tentang organisasi keagamaan yang pertama kalinya dapat dilihat pada perkumpulan Jamiat al-Khair yang didirikan pada tahun 1903. Tetapi organisasi ini lebih menekankan pada aspek pendidikan. Pada masa itu, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Belanda sering disosialisasikan kepada hal-hal yang berbau kristenisasi di Indonesia. Karena itulah, Jamiat al-Khair menawarkan alternatif berupa sekolah (madrasah) yang menyajikan suatu pendidikan yang tidak kalah dengan mutu pendidikan yang dikelola Belanda, yaitu memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama (Daya, 1990: XV).

Hal serupa juga dilakukan oleh perkumpulan al-Irsyad (*Jamiat al-Islamiyah Wal Irsyad al-Arabiah*) yang didirikan pada 1914. Tokoh utama yang amat disegani dan memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luas dalam organisasi ini adalah Ahmad Syurkati (1872-1943 M), seorang ulama kelahiran Sudan yang mengembara untuk memperdalam ilmu agama sampai ke Madinah dan Makkah, kemudian bermukim lama di sana. Beliau banyak membantu proses modernisasi keagamaan Islam di Indonesia.

Periode modernisasi keagamaan berikutnya dapat dipotret lewat munculnya sejumlah organisasi Islam yang semakin banyak. Dalam hal ini, pembicaraan seputar organisasi Muhammadiyah tentu tidak

saja tidak bisa dilewatkan begitu saja. Organisasi ini didirikan oleh seorang ulama modern, KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) pada tahun 1912 di Yogyakarta. Fokus kegiatan Muhammadiyah lebih cenderung pada kegiatan pendidikan, kesehatan, komitmen terhadap permasalahan kebodohan dan kemiskinan dari pada persoalan politik formal.

Selanjutnya, gerakan modernisasi keagamaan Islam di Indonesia dilanjutkan dalam wilayah politik dengan terbentuknya Sarekat Islam (SI), semula bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan sejak tahun 1912 di Solo oleh Haji Samanhudi (1868-1956) yang dianggap sebagai pembuka pintu gerbang lahirnya Islam politik di Indonesia.

Setelah kemunculan Sarekat Islam ini, proyek modernisasi Islam lebih berwarna politis ketimbang akademis (intelektual). Gagasan dan diskursus yang berkembang banyak diwarnai dengan perdebatan seputar hubungan Islam dan negara. Dalam hal ini kalangan Muslim modernis yang menginginkan terealisasinya keyakinan-keyakinan agama mereka ke dalam kehidupan sosial konkrit (Juergensmeyer, 1998: 12). Sehingga melahirkan polemik yang menyangkut “ideologi” apakah yang akan menjadi dasar negara setelah kemerdekaan.

Sejauh pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa modernisasi keagamaan ternyata tidak timbul dengan sendirinya, melainkan sebagai respon atas dialektika yang muncul di masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi katalisator bagi munculnya modernisasi keagamaan Islam di Indonesia adalah;

*Pertama*, faktor sosial-budaya. Pembaharuan (modernisasi) yang muncul pada masa awal di Indonesia tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Ketika Islam masuk ke Indonesia, sebenarnya secara tidak langsung telah terjadi proses akulturasi yang terjadi begitu lama. Konsekuensi dari akulturasi semacam ini adalah semangat keberagaman yang khas Indonesia. Sehingga ketika Clifford Geertz melakukan studi tentang Islam di Indonesia, kebingungannya nampak ketika dia membagi masyarakat Jawa (Indonesia) itu terbagi kepada tiga kategori, yakni “priyai” (berorientasi Jawa-Hindu), “santri” (berorientasi Islam), dan “abangan” (berorientasi animistik) (Ward, 1999: 22).

Asimilasi budaya pribumi dengan tradisi Islam memang kerap membawa seorang pada cara beragama yang campur aduk (sinkretik), sehingga mengundang beberapa ulama yang sudah terdidik di Timur-Tengah untuk mengadakan pembaharuan, purifikasi demi membersihkan agama dari unsur-unsur irrasionalitas, takhyayul dan bid'ah.

*Kedua*, faktor politik. Berbarengan dengan itu pula, kedatangan pihak asing yang telah membawa kesengsaraan dan krisis di berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sehingga krisis kebudayaan. Di samping proyek kristenisasi yang dibawa serta oleh kaum imperialisme sedikit banyak menggugah semangat dan menimbulkan resistensi di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka yang mendapat pendidikan yang memadai, terutama yang berasal dari luar negeri (Barat dan Timur Tengah) mulai mengalihkan perhatian dari pada sekedar kritik budaya (internal) kepada aksi politik menentang imperialisme. Dari sekedar *men of idea* menuju *men of power* yang mengerakkan.

*Ketiga*, faktor pendidikan. Keterbelakangan di bidang pendidikan telah dari awal menarik perhatian kaum modernis Islam. Terlebih ketika itu dikaitkan dan dibandingkan dengan kemajuan bangsa asing. Kalangan modernis kemudian menyimpulkan bahwa keterbelakangan tersebut, diantaranya, disebabkan oleh kekakuan model pendidikan yang hanya berkutat pada kitab kuning, pengajaran moral dan tarekat-tarekat. Padahal kemajuan umat Islam juga harus didukung oleh kemajuan di bidang teknologi sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa asing. Di sinilah kaum modernis Islam menawarkan sinkronisasi dan integrasi antara pendidikan Islam dan pendidikan ala Barat.

*Keempat*, faktor teologis. Persoalan besar yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah kemajemukan agama yang niscaya dan tidak bisa dielakkan di negara Indonesia. Untuk menjembatani persoalan tersebut, umat Islam kembali harus melakukan pembacaan ulang terhadap teologi mereka. Dalam konteks itulah lahir sebuah teologi Islam pluralis yang mencoba membangun sebuah keberagamaan inklusif dan saling pengertian (*mutual understanding*) antar pemeluk agama di Indonesia.

## **Modernisasi Keagamaan A. Mukti Ali**

Setidaknya terdapat dua faktor yang melatarbelakangi modernisasi keagamaan yang dilakukan oleh A. Mukti Ali .

### ***Faktor Internal***

Faktor yang datang dari A. Mukti Ali ini erat kaitanya dengan kualitas pendidikan yang dilalui oleh A. Mukti Ali, yaitu jenjang pendidikan awalnya yang ditempuh di pesantren Termas dengan menggunakan sistem kelas dan mengajarkan beberapa mata kuliah umum. Latar belakang pendidikan yang sangat mempengaruhi keintelektualan atau pola pikir A. Mukti Ali yang modern tentunya adalah pendidikan di program sarjana muda Fakultas Sastra Arab dan program doktor di Universitas Karachi Pakistan, dengan spesialisasi Sejarah Islam. Sosialisasinya di Karachi membuatnya dapat berkenalan dengan sejumlah orientalis Barat yang menulis tentang Islam (Munhanif, 1998: 280-281). Pada tahap ini, A. Mukti Ali mulai berkenalan dengan pandangan-pandangan orientalis terhadap Islam yang lebih objektif. Dari mereka pula A. Mukti Ali mengenal tantangan dan harapan dalam hubungan antar agama dan modernisasi.

Setelah lima tahun di Universitas Karachi, A. Mukti Ali melanjutkan studi di *Institute of Islamic Studies*, Mc Gill University, Montreal Kanada. Di universitas inilah, A. Mukti Ali berkenalan dengan metode studi agama-agama dalam hubungannya dengan persoalan kemasyarakatan. Salah seorang profesor yang berpengaruh dan dikaguminya adalah Wilfred Cantwell Smith, seorang orientalis berkebangsaan Amerika yang pemahamannya terhadap Islam cumkupas membuatnya terarik dan simpatik (Munhanif, 1998: 281).

Seperti diakuinya sendiri, A. Mukti Ali amat terpicat oleh program kajian Islam di Universitas Mc Gill, yang diajarkan dengan pendekatan sistematis, rasional, dan holistik, baik dari segi ajaran, sejarah, maupun peradabannya. Di sanalah A. Mukti Ali menyadari bahwa kajian agama mestinya diarahkan pada usaha bagaimana tradisi keagamaan bisa menjawab masalah-masalah masyarakat modern, atas kesadaran inilah A. Mukti Ali berupaya memperkenalkan pendekatan empiris dalam pemahaman Islam sebagai jalan untuk menafsir ulang khazanah pemikiran Islam dalam konteks modern di Indoensia.

### ***Faktor Eksternal***

Faktoreksternal yang melatarbelakangi gerakan modernisasi yang dilakukan oleh A. Mukti Ali adalah faktor sosial politik keagamaan di Indonesia. Melihat kehidupan sosial-politik dan keagamaan di Indonesia, A. Mukti Ali berkeinginan menjadikan agama sebagai landasan pembangunan nasional. A. Mukti Ali menginginkan baik secara teoritis dan empiris, bahwa agama adalah pendorong utama proses pembangunan. Atas dasar keinginan tersebut, A. Mukti Ali melakukan berbagai modernisasi dalam bidang politik keagamaan di Indonesia (Madjid, 1998: 122-123).

Persoalan politik keagamaan yang dirasakan oleh A. Mukti Ali bermula adanya krisis kepemimpinan pada umat Islam di Indonesia. Kepemimpinan dirasakan sulit mengejawantahkan kerana adanya faktor-faktor sosio-psikologis yang melanda Umat Islam dalam sejarahnya sebagai berikut; 1) jiwa bangsa Indonesia masih amat terpengaruh oleh fase revolusi bersenjata; 2) selama masa penjajahan bangsa Indonesia tidak mengenal istilah “pimpinan” atau “leadership”, yang dikenal adalah “perintah” dan “kekuasaan”; 3) bangsa Indonesia tidak memiliki pengalaman yang berarti tentang kepemimpinan; 4) pada masa pra-kemerdekaan, bangsa Indonesia hidup dalam feodalisme dan kolonialisme.

Khusus tentang pendidikan, A. Mukti Ali melihat beberapa kendala krusial dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ia melihat ada kemacetan saluran yang menyebabkan lulusan lembaga pendidikan agama Islam tidak tersalur ke perguruan tinggi umum. Misalnya, lulusan Pendidikan Guru Agama (PGA) tidak dapat melanjutkan studi di fakultas sosial politik atau fakultas umum lainnya. Hal ini diakibatkan perbandingan kurikulum umum 70% berbanding 30% pendidikan agama dari keseluruhan kurikulum yang ada (Abdurrahman, 1993: 36).

Selain itu, A. Mukti Ali juga sejak awal (ketika menjadi pengajar di perguruan tinggi termasuk IAIN Yogyakarta) menemukan bahwa kehidupan Intelektual di IAIN sangat memprihatikan dan mempunyai banyak kelemahan diantaranya; *pertama*, lemahnya semangat keilmuan di kalangan para pengajar yang berdampak pada mahasiswa; *kedua*, kurangnya penguasaan metodologi, yaitu metodologi pemahaman keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Oleh karena itu A. Mukti Ali mengadakan modernisasi IAIN dan meninjau ulang kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia.

### **Pemikiran A. Mukti Ali Tentang Modernisasi Keagamaan**

Secara sederhana, modernisasi menurut A. Mukti Ali adalah menunjuk pada sesuatu yang dianggap baik. Namun sesuatu yang dianggap “baik” dalam modernisme bersifat relatif. Modernisme di Barat berbeda pemahamannya dan penerapannya di Indonesia. Umat Islam di Indonesia harus didasarkan pada bentuk perjalanan sejarah Indonesia sendiri dan perjalanan sejarah Umat Islam secara keseluruhan di dunia ini (Ali, 1987: 229-230). Dalam perjalanan sejarah, munculnya gerakan dan usaha modernisasi dikalangan umat Islam adalah sebagai respon terhadap kemunduran Umat Islam dibandingkan Umat Kristen di Barat. Dalam pandangan A. Mukti Ali, sebab-sebab kemunduran umat Islam berawal dari penyimpangan yang dilakukan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Jadi, inti dan tujuan modernisme di kalangan umat Islam adalah mengajak pada kemajuan dengan cara memanggil kembali kepada ajaran Islam yang murni (Ali, 1987: 244-245).

Demikianlah konsep A. Mukti Ali tentang modernisasi keagamaan dalam Islam, bahwa modernisme di Indonesia tidak mesti berlangsung sebagaimana yang terjadi di Barat. Agama tetap menjadi faktor penting dalam menjalankan modernisme. Bahkan modernisme harus tetap berlangsung dengan baik, maka perlu diintegrasikan dan didialogkan dengan agama-agama yang dipeluk masyarakat Indonesia. Agama dan penganutnya jangan sampai menjadi penghalang dalam proses modernisasi di Indonesia. Karena itu, langkah pertama yang diambil A. Mukti Ali adalah menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan umat beragama agar mereka bersama-sama menjalankan proses dan program modernisasi di Indonesia.

### **A. Mukti Ali dan Pembentukan Departemen Agama**

Sebagai menteri agama, A. Mukti Ali sebenarnya memiliki peluang yang lebih besar dalam mengaktualkan dan menjalankan pemikiran modernisme keagamaan. A. Mukti Ali memiliki

kekuatan politis dalam menjabarkan dan menerapkan pemikiran modernisasinya. Karena itu, ketika masih menjabat sebagai menteri agama, A. Mukti Ali banyak memperjuangkan aspirasi umat Islam. Diantaranya yang paling penting adalah A. Mukti Ali berhasil meyakinkan Pemerintah Orde Baru bahwa ajaran Islam dan penganutnya di Indonesia dapat menyesuaikan diri dan bahkan ikut serta dalam pembangunan. Bersamaan dengan hal itu, A. Mukti Ali mempersiapkan perangkat dan institusi untuk modernisasi keagamaan di Indonesia.

Selain melanjutkan kebijakan terdahulu, A. Mukti Ali juga melakukan semacam pembaruan dalam kebijakan Departemen Agama, yang diarahkan langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perbaikan di dalam tubuh Departemen Agama. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 1) Perbaikan di dalam tubuh Departemen Agama. A. Mukti Ali melakukan penertiban organisasi, administrasi dan personalia. Serta meningkatkan kompetensi para karyawan dalam tugas masing-masing, antara lain dengan penataran, pendidikan dan latihan, lokakarya, *refreshing course* bagi kepala perwakilan Departemen Agama dan IAIN seluruh Indonesia, konferensi kerja, dan pengiriman karyawan untuk tugas belajar di dalam dan keluar negeri. 2) Kerja sama dengan departemen-departemen lain sebagai upaya integrasi berbagai aktivitas pembangunan. Departemen Agama telah mengadakan kerja sama dengan departemen-departemen lain; a) Keputusan bersama dengan Menteri Pertanian mengenai pembinaan pondok pesantren dalam bidang ternak; b) Keputusan bersama dengan Menteri Transmigrasi dan Koperasi tentang pembinaan Koperasi pada pondok pesantren; c) Keputusan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K, tentang Kurikulum, penataran guru dan buku paket di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang dituangkan dalam SKB tiga Menteri.

Kebijakan-kebijakan di atas, terlihat nyata telah memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam tubuh Departemen Agama, terutama melalui kebijakan-kebijakan fundamental yang mengarah pada reorientasi Departemen Agama umumnya, dan pengembangan pendidikan Islam pada khususnya. Selain itu, hal vital lain yang tidak kalah penting adalah merekrut kembali kelompok-kelompok non-

tradisional berpendidikan Barat dalam birokrasi kementeriannya. Hal tersebut jelas memberikan kontribusi yang amat besar dalam sejarah Departemen Agama di kemudian hari.

Secara garis besar, kerangka kebijakan keagamaan. A. Mukti Ali mengikuti keyakinannya pada posisi agama dalam Pancasila dan peran agama di dalam agenda modernisasi Orde Baru. Dasar Negara Pancasila merupakan suatu bentuk konsumsi politik dari upaya mencari landasan persatuan dari seluruh komunitas-komunitas agama; Islam, Kristen, katolik, Hindu, dan Budha. Sehingga terciptalah suatu basis ideologi politik yang dapat diterima oleh semua pihak yang mengambil bentuk otoritas negara non-teokratis. Dengan demikian, menurut A. Mukti Ali, diasumsikan adanya suatu sistem pemerintahan dengan bentuk memisahkan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Tetapi pada sisi lain, pemerintahan turut bertanggung jawab dalam mendukung membina kehidupan agama masyarakat. Negara berdasarkan Pancasila, dengan demikian mengakui wewenang Departemen Agama dan Kebijakan-kebijakan keagamaan sebagai bagian yang integral dari kebijakan politik pemerintah (Munhanif, 1996: 116-117).

### **Dialog dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama**

Modernisasi bidang keagamaan yang dilakukan A. Mukti Ali, terutama yang berkenaan dengan dialog dan kerukunan hidup antar umat beragama, erat kaitannya dengan bidang keilmuan perbandingan agama yang digelutinya. Dialog dan kerukunan hidup antar umat beragama menjadi prioritas program modernisasinya, didasarkan atas beberapa kenyataan historis bahwa hal tersebut amat dibutuhkan dalam pembangunan, dan sebenarnya telah memiliki benih-benih yang jelas dalam kehidupan bangsa Indonesia, walaupun belum signifikan.

Dalam karyanya, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, A. Mukti Ali menjelaskan bahwa sebenarnya dialog antar pemeluk agama di Indonesia sudah pernah dilaksanakan yaitu pada tahun 1968. Dialog tersebut diprakarsai oleh pemerintah, dalam hal ini KH. Muhammad Dahlan sebagai Menteri Agama, yang dihadiri oleh pemimpin Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Tetapi dapat dikatakan usaha tersebut tidak berhasil, karena

satu tuntutan pemimpin Islam yang signifikan tidak disetujui oleh pemimpin Katolik dan Protestan, yaitu saran agar penyiaran agama tidak ditujukan pada orang-orang yang sudah beragama. Akibatnya, dialog tersebut tidak menghasilkan perumusan kesepakatan yang diharapkan (Ali, 1992: 83).

Belajar dari kegagalan tersebut, A. Mukti Ali ketika memegang kedudukan tertinggi dalam kementerian agama, menghidupkan kembali forum musyawarah antar umat beragama. Forum tersebut difungsikan kembali di bawah pimpinan A. Mukti Ali sendiri dengan tugas mendiskusikan, membicarakan, dan memberikan sumbangan terhadap berbagai masalah konflik antar umat beragama. Lewat forum yang dikatakan non-pemerintah tersebut, A. Mukti Ali mengharapkan munculnya sikap saling menghormati antar umat beragama (Munhanif, 1998: 305).

### **Kepemimpinan Umat Islam**

Sebagai upaya mengatasi masalah kepemimpinan umat Islam, A. Mukti Ali membidani kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. hal ini dilakukan berdasarkan satu kenyataan bahwa ada semacam kesulitan pemerintah untuk mendialogkan kebijakannya tentang masalah agama Islam, karena terbetur dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berada di bawah partai politik Islam. Karena itulah A. Mukti Ali membentuk MUI, sebagai wahana untuk menggalang aspirasi umat Islam di bidang agama dan sosial. Sekaligus sebagai organisasi penyuar aspirasi umat Islam. A. Mukti Ali meminta Buya Hamka sebagai Pemimpin pertama MUI (Munhanif, 1992: 301)

Langkah awal pendirian MUI tidak hanya menempatkan A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama yang berhasil menyuarakan kepentingan umat, tetapi yang telah berhasil menjadikan MUI sebagai “juru bicara pemerintah” ketika berhadapan dengan kelompok Islam (Munhanif, 1992: 302). Untuk batas ini, MUI memang dapat dikatakan sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dengan umat Islam, demikian pula sebaliknya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa A. Mukti Ali telah memainkan peran penting dalam mempertemukan antara paham modernisme dan agama di Indonesia. Lebih penting dari itu, A. Mukti Ali mampu menunjukkan bahwa ajaran Islam bukanlah penghalang bagi proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Ketika akan menjalankan program pembangunan dan modernisasi di Indonesia, pemerintah Orde Baru sangat menyadari peran umat beragama. Lembaga terpenting akan menjembatani proses pembangunan dan umat beragama di Indonesia adalah Departemen Agama. Pemerintah menemukan pada figur A. Mukti Ali yang menjalankan tugas berat tersebut.

Ada beberapa catatan penting yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran A. Mukti Ali diantaranya ialah; 1) Faktor internal, yang berkaitan dengan pendidikan yang dialami oleh A. Mukti Ali sendiri dan sangat mempengaruhi pemikirannya semenjak di pesantren kemudian dilanjutkan ke Universitas Karachi hingga Mc Gill yang mengajarkan sistem modern dalam cara berpikir dan memahami agama yang holistik. 2) Faktor eksternal modernisasi yang dilakukan A. Mukti Ali adalah faktor sosial politik keagamaan di Indonesia. A. Mukti Ali berkeinginan menjadikan agama sebagai landasan pembangunan; 3) Menurut A. Mukti Ali, modernisasi keagamaan di Indonesia berbeda dengan pemahamannya dan penerapannya dengan meodernisasi yang ada di Barat. Modernisasi keagamaan di Indonesia harus didasarkan pada kesadaran sendiri dan didasarkan pada bentuk perjalanan sejarah Indonesia dan perjalanan umat Islam di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1966
- Ali, A. Mukti, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1972
- , *Perbagai Persoalan Islam di Indonesia Dewasa Ini*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970
- , *Alam Pikiran Moderen di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971
- , "Kata Pengantar: Ahmad Wahib (Anak Muda Yang Bergulat dalam Pencaharian)" dalam Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1995
- , *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta Rajawali Press, 1987
- , *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung; Mizan, 1988
- , *Ijtihad Dalam Pandangan M. Abduh, Ahmad Dahlan dan Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- , *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- , *Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993
- , *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Jembatan, 1994
- Anonim, *Amal Bakti Departemen Agama RI. 3 Januari 1946 – 3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Jakarta:

- Departemen Agama RI, 1987
- Boland, *The Struggle of Islam In Indonesia Modern*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971
- Burhanuddin, Daya, *Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990
- Dammi, M, Dkk, "A. Mukti Ali: Ketaatan, Kesalehan dan Kecenkawanan", dalam Abdurahman, Burhanuddin Daya, Djamahuri, *70 Tahun H. A. Mukti Ali : Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Prss, 1993
- Ward, Mark R Wood, ed, *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, terj, Ihsan Ali-Fauzi, Bandung: Mizan, 1999
- Hassan, Ahmad, *The Doctrine of Ijma in Islam*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1976
- , *Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987
- Haris, Ahmad, "Inovation and Tradision in Islam: A Study on Bid'ah as an Interpretation of Religion in The Indonesia Experience", disertasi, Philadelphia, USA: Temple University, 1997
- Hornby, *Oxford Advanced Learner's of Current English*, Oxford: Oxford Univesity Press, 1987
- Jabali, Fuad dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002
- Juergensmeyer, Marks, *Menentang Negara Sekuler*, Bandung: Mizan, 1998
- Koentraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1974
- Munhanif, Ali, "Islam and The Struggle for Religious Pluralism: A Reading of The Religious Thought of A. Mukti Ali" dalam Studi Islamika, Vol. 3, No. 1, 1996
- Munhanif, Ali, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik keagamaan Orde Baru" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, eds., *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987

- , 1998. "Dakwah Islam Indonesia: Tantangan Pasca Kolonialisme dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Plural", dalam A. Mukti Ali, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1987
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1996
- , *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-16, 1996
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1990-1992*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Rahardjo, Dawam, "Islam dan Modernisasi: Catatan Atas Paham Sekularisasi Nurcholis Madjid" dalam Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesian*, Bandung: Mizan, 1987
- Steenbrink, Karel A, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984